



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI

JALAN WOLTER MONGINSIDI NOMOR 82 A RANOMEETO KENDARI
TELEPON (0401) 3196383, FAKSIMILE (0401) 3196383
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bkipm.kendari@kkp.go.id

9 Juli 2025

Yth. Sekretaris BPPMHKP
Di Jakarta

SURAT PENGANTAR
Nomor B.373.1/SKIPM.KDI/TU.210/VII/2025

No	Jenis dokumen Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Berkas Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2025 Stasiun KIPM Kendari	1 Laporan	Dikirim dengan hormat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.



Plt. Kepala Stasiun KIPM Kendari,

Tamrin

Diterima tanggal :

Nama Penerima :

Tanda Tangan :



**KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN**

**SKIPM
KENDARI**

TRIWULAN II

2025

**LAPORAN
KINERJA**

STASIUN KIPM KENDARI

Jalan Wolter Monginsidi No. 82 A Ronmeeto, Kendari



www.kkp.go.id | [bkipmkendari](#)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kendari (LKj SKIPM Kendari) Triwulan II Tahun 2025 dapat diselesaikan.

LKj SKIPM Kendari Triwulan II Tahun 2025 disusun dalam rangka memberikan informasi tentang capaian kinerja terkait program dan kegiatan SKIPM Kendari selama Triwulan II, baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Untuk mewujudkan unit kerja yang akuntabel, indikator-indikator kinerja disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Sebagaimana dalam Triwulan II tahun 2025, perhitungan capaian target kinerja sejak Triwulan II sudah menggunakan target kinerja yang baru.

Semoga LKj SKIPM Kendari Triwulan II Tahun 2025 ini dapat menjadi menjadi sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja SKIPM Kendari, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan untuk peningkatan kinerja SKIPM Kendari di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Kendari, 9 Juli 2025
Plt. Kepala SKIPM-Kendari,

Tamrin, S.Pi., M.M

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
IKHTISAR EKSEKUTIF	5
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1. LATAR BELAKANG	7
1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	8
1.3. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	12
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	14
2.1 CAPAIAN KINERJA	14
2.2 ANALISIS DAN EVALUASI	17
BAB III PENUTUP	48
LAMPIRAN	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Sasaran Strategis dan Target Indikator Kinerja SKIPM Kendari	13
Tabel 2. 1 Capaian Kinerja SKIPM Kendari Triwulan II Tahun 2025	16
Tabel 2. 2 Target dan Realisasi Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari	21
Tabel 2. 3 Target dan Realisasi Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari	25
Tabel 2. 4 Target dan Realisasi Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari	29
Tabel 2. 5 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari	32
Tabel 2. 6 Target dan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari	35
Tabel 2. 7 Target dan Realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari	38
Tabel 2. 8 Target dan Realisasi Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari	41
Tabel 2. 9 Target dan Realisasi Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari	43
Tabel 2. 10 Target dan Realisasi Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari	46
Tabel 2. 11 Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja pada Triwulan II Tahun 2025	46
Tabel 2. 12 Penyerapan Anggaran per Jenis Kegiatan pada Triwulan II Tahun 2025	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Stasiun KIPM Kendari	10
Gambar 1. 2 Komposisi SDM Organisasi Stasiun KIPM Kendari Tahun 2025	12
Gambar 2. 1 Dashboard Capaian IKU dan IK Triwulan II Tahun 2025	15
Gambar 2. 2 Raport Kinerja Stasiun KIPM Kendari per Triwulan selama tahun 2025	15

IKHTISAR EKSEKUTIF

Nilai kinerja IKU dan IK Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kendari pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 110,51% (Istimewa). Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja SKIPM Kendari yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

- A. Dari 14 Indikator Kinerja Kegiatan, terdapat 9 Indikator Kinerja Kegiatan (112,03%) yang pencapaiannya memenuhi atau melebihi target, dan tidak terdapat yang pencapaiannya kurang dari target.
- B. Uraian dari 9 IKU dan 3 Sasaran sebagai berikut:
1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari terealisasi 100% dari target 70% atau 120%;
 2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari terealisasi 86,21% dari target 70% atau 120%;
 3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari terealisasi 100% dari target 99% atau 101,01%;
 4. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari terealisasi 81,90 dari target 85 atau 96,35%;
 5. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari terealisasi 83,33 dari target 75 atau 111,11%;
 6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari terealisasi 100% dari target 85% atau 117,65%;
 7. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari terealisasi 100% dari target 76% atau 120%;
 8. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari terealisasi 66,81% dari target 50% atau 120%;

9. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari terealisasi 93,77 dari target 88 atau 106,56%;

Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Kendari sampai Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 2,416,734,069 atau mencapai 29,46% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 8,203,239,000. Pagu anggaran SKIPM Kendari tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Pengendalian Mutu dan Manajemen Mutu.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LKj atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKj tahunan berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

1. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
3. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
4. perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

LKj Triwulan II Tahun 2025 SKIPM Kendari disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SKIPM Kendari dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Triwulan II Tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Di samping itu juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja serta sarana untuk

mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja SKIPM Kendari. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka mencapai visi, misi, fungsi, tujuan, serta sasaran strategis, SKIPM Kendari perlu didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada SKIPM Kendari secara efektif dan efisien. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

1. Kedudukan, tugas dan fungsi SKIPM Kendari:

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. Nomor 92/Permen-Kp/2020 tanggal 28 Desember 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2023 perubahan atas Peraturan Presiden nomor 2 Tahun 2017 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan maka Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BPPMHKP), SKIPM Kendari merupakan Unit Pelaksana Teknis mengemban menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dalam melaksanakan tugas tersebut, SKIPM Kendari menyelenggarakan fungsi :

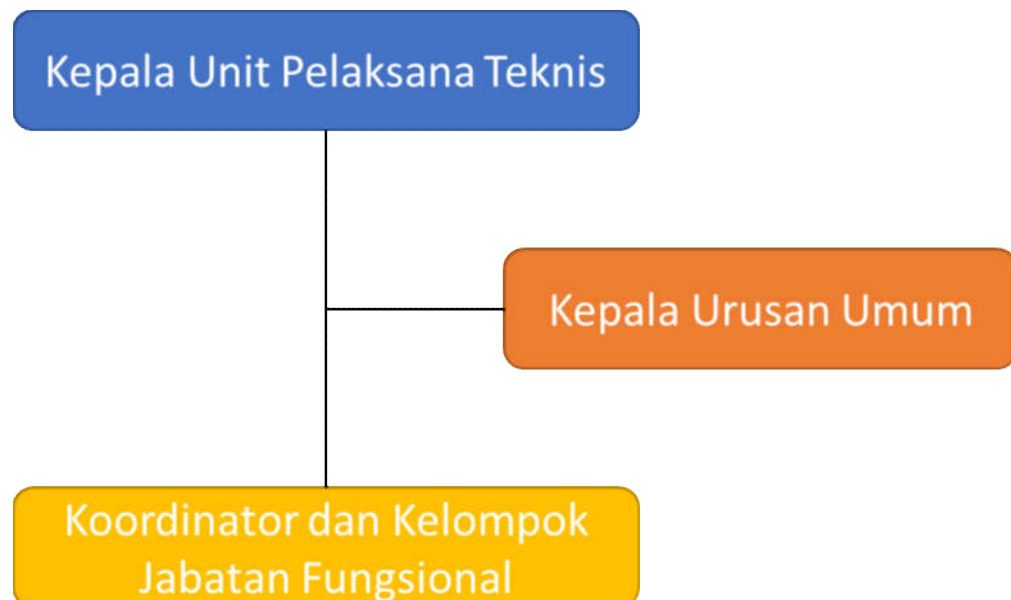
- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- b. Pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;

- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantina ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
 - d. Pelaksanaan administrasi BPPMHKP; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
2. Struktur organisasi SKIPM Kendari SKIPM Kendari merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPMHKP di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 92/Permen-Kp/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Wilayah Kerja untuk mendukung fungsi UPT induknya. Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu, dengan mengemban fungsi:
- a) Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b) Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya HPI dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
 - c) Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa HPIK;
 - d) Pelaksanaan pemantauan HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 - e) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 - f) Pelaksanaan inspeksi terhadap Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
 - g) Pelaksanaan surveilan HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 - h) Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 - i) Pelaksanaan pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 - j) Penerapan sistem manajemen mutu pada laboratorium dan pelayanan operasional;
 - k) Pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK;

- l) Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan
- m) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

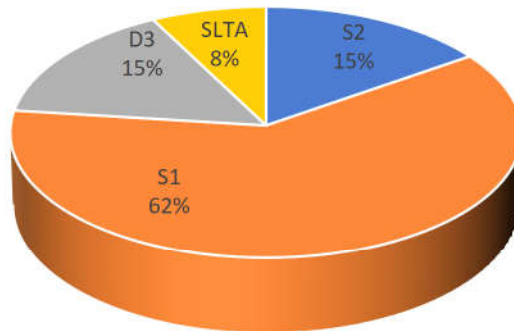
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Stasiun KIPM Kendari , Kepala Stasiun dibantu oleh kelompok Jabatan Fungsional, diantaranya Inspektur Mutu Hasil Perikanan, Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, Pranta Keuangan APBN dan Jabatan Fungsional Umum lainnya.

Jumlah SDM aparatur yang mendukung saat ini berjumlah 13 orang pegawai, dengan komposisi pegawai 12 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Komposisi pegawai yang berimbang dari segi jabatan, golongan, pendidikan dan kompetensi merupakan dukungan dalam pencapaian sasaran kinerja dalam perspektif learning and growth.



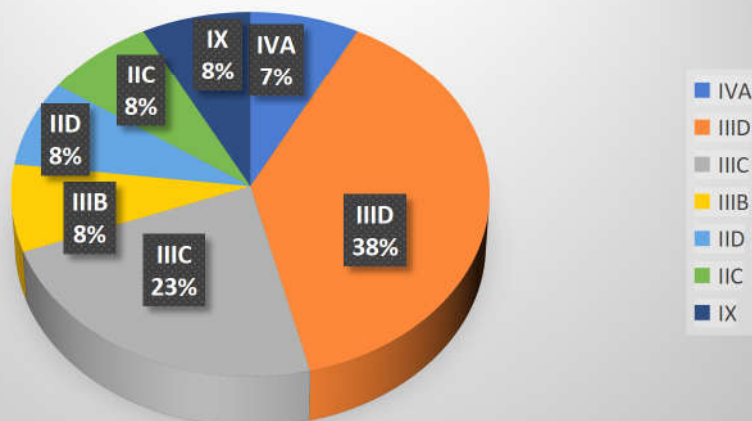
Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Stasiun KIPM Kendari

BERDASARKAN PENDIDIKAN



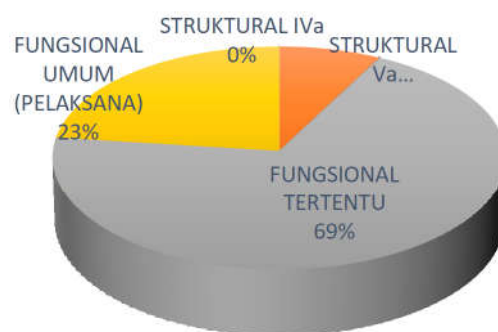
■ S2 ■ S1 ■ D3 ■ SLTA

BERDASARKAN GOLONGAN



■ IVA
■ IIID
■ IIIC
■ IIB
■ IID
■ IIC
■ IX

BERDASARKAN JABATAN



■ STRUKTURAL IVa ■ STRUKTURAL Va
■ FUNGSIONAL TERTENTU ■ FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA)

Gambar 1. 2 Komposisi SDM Organisasi Stasiun KIPM Kendari Tahun 2025

1.3. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
			2025	TRIWULAN II
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	70	100
	2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	70	86,21
	3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	99	100
Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	75	0
	5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	75	0
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	92	81,90
	7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	71,5	0

Kelautan dan Perikanan	8.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	100	0
	9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Indeks)	87	83,33
	10.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	86	0
	11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	85	100
	12.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	76	100
	13.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	70	66,81
	14.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	88	93,77

Tabel 1. 1 Sasaran Strategis dan Target Indikator Kinerja SKIPM Kendari

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

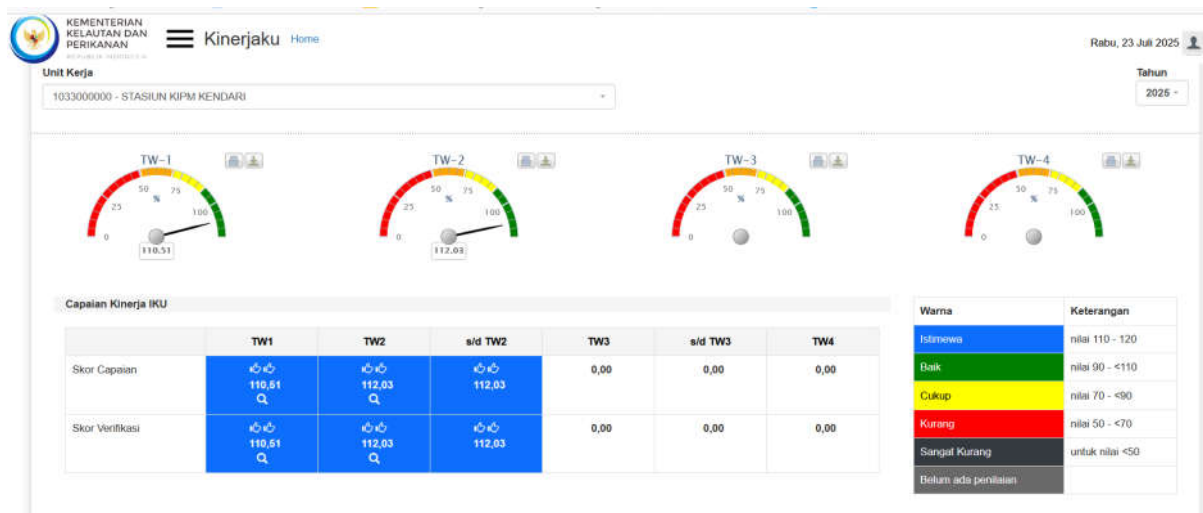
2.1 CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja antara Plt. Kepala SKIPM Kendari dengan Kepala BPPMHKP yang ditandatangani pada tanggal 31 Januari 2025, dilakukan pengukuran capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi berdasarkan Indikator Kinerja. Untuk Indikator Kinerja Kegiatan yang capaiannya diukur secara tahunan diperhitungkan sesuai dengan karakteristik Indikator Kinerja Kegiatan dimaksud.

Pelaksanaan pengukuran kinerja pada SKIPM Kendari, sebagaimana unit kerja lain di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja secara online yaitu melalui website www.kinerjaku.kkp.go.id.

Proses penghitungan kinerja menggunakan pedoman Manual IKU yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan- kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggung jawabnya.

Capaian kinerja SKIPM Kendari pada Triwulan II 2025 sudah baik, hal ini ditandai dengan Nilai Capaian Kinerja IKU sebesar 112,03% seperti pada gambar Dashboard Aplikasi Kinerjaku berikut ini.



Gambar 2. 1 Dashboard Capaian IKU dan IK Triwulan II Tahun 2025

Berikut ini ditampilkan Raport Kinerja Stasiun KIPM Kendari per Triwulan selama tahun 2025 sebagaimana gambar 2.2 berikut :

Raport Kinerja Juni - 2025
Unit Kerja: STASIUN KIPM KENDARI
Skor Kinerja: 112.03

NO	SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	POLARISASI	TW-1		TW-2		SMD-1		TW-3		s/d TW-3		TW-4		s/d TW-4	
						TG	CP	TG	CP	TG	CP	TG	CP	TG	CP	TG	CP	TG	CP
1	Tertungganya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran Perikanan	IKS.1	Persentase Hasil Keluaran dan Produksi Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari	%	Maximize	0,00	0,00	75,00	100,00	75,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
2	Tertungganya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran Perikanan	IKS.2	Persentase Hasil Keluaran dan Produksi Sektor Produksi Pasca Pemas yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari	%	Maximize	75,00	81,82	70,00	86,21	75,00	86,21	70,00	8,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
3	Tertungganya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran Perikanan	IKS.3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan keamanan oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari	%	Maximize	99,00	100,00	99,00	100,00	99,00	100,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00
4	Tertungganya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil keluaran dan perikanan yang konsisten sesuai standar	IKS.02.1	Nilai kepatuhan perikanan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari	Nilai	Maximize	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00
5	Tertungganya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil keluaran dan perikanan yang konsisten sesuai standar	IKS.02.1	Nilai kepatuhan perikanan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari	Nilai	Maximize	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	18,75	0,00
6	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, Incha dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran dan Perikanan	IKS.03.1	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari	Nilai	Maximize	0,00	0,00	85,00	81,90	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00
7	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, Incha dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran dan Perikanan	IKS.03.2	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari	Nilai	Maximize	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
8	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, Incha dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran dan Perikanan	IKS.03.3	Persentase Penyelesaian Tuntutan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari	%	Maximize	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
9	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, Incha dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran dan Perikanan	IKS.03.4	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari	Indeks	Maximize	0,00	0,00	75,00	83,33	75,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00
10	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, Incha dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran dan Perikanan	IKS.03.5	Penilaian Mandiri SAMP lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari	Nilai	Maximize	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00
11	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, Incha dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran dan Perikanan	IKS.03.6	Persentase Realisasi Hasil Pengawasan yang Dimerikan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari	%	Maximize	85,00	100,00	85,00	100,00	85,00	100,00	85,00	0,00	85,00	66,67	85,00	0,00	85,00	50,00
12	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, Incha dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran dan Perikanan	IKS.03.7	Persentase rencana umum pengadaan PSU yang diumumkan pada SRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari	%	Maximize	76,00	100,00	76,00	100,00	76,00	100,00	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00
13	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, Incha dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran dan Perikanan	IKS.03.8	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integrasi lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari	%	Maximize	0,00	0,00	50,00	66,61	50,00	66,61	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
14	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, Incha dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Keluaran dan Perikanan	IKS.03.9	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari	Nilai	Maximize	88,00	86,69	88,00	93,77	88,00	93,77	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00

Gambar 2. 2 Raport Kinerja Stasiun KIPM Kendari per Triwulan selama tahun 2025

Secara rinci capaian Indikator Kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis SKIPM Kendari pada Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Capaian Kinerja SKIPM Kendari Triwulan II Tahun 2025

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	TRIWULAN II		
				T	R	%
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	70	70	100	120
	2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	70	70	86,21	120
	3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	99	99	100	101,01
Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	75	0	0	0
	5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	75	0	0	0
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	92	85	81,90	96,35
	7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	71,5	0	0	0
	8.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	100	0	0	0
	9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Indeks)	87	75	83,33	111,11
	10.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	86	0	0	0
	11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	85	85	100	117,65

	12.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	76	76	100	120
	13.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	70	50	66,81	120
	14.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	88	88	93,77	106,56

2.2 ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis secara lebih detail menurut indikator kinerjanya dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Seluruh produk perikanan, baik yang dikonsumsi dalam negeri maupun untuk ekspor, memiliki mutu yang baik dan aman untuk dikonsumsi. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta sistem pengendalian yang efektif terhadap kualitas hasil kelautan dan perikanan sejak dari produksi, pengolahan, hingga distribusi. Tujuannya adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat, meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global, serta mendukung kepatuhan terhadap standar nasional dan internasional. Selain itu, kegiatan ini juga berfungsi sebagai upaya pembinaan bagi pelaku usaha agar menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan dan pengolahan yang higienis secara konsisten..

1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari

- a. Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan

perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

- b. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- c. Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.
- d. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada: 1. Standar Nasional Indonesia (SNI) 2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku .
- e. Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Cara Pengukuran :

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal

xn = Jumlah dari unsur pembentuk

$$\%X = \frac{0 + 0 + 0 + 0 + 100}{1} \times 100\%$$

$$\%X = 100\%$$

Pada Semester I tahun 2025 Stasiun KIPM Kendari hanya melakukan sertifikasi terhadap 1 jenis sertifikasi yaitu :

- a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;

1. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di atas kapal adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan. Inspeksi dilakukan di PPS Kendari pada 4 unit kapal perikanan dan PPI Sodohoa Kendari pada 3 unit kapal perikanan,. Dengan total 7 kapal yang diinspeksi.

Output dari kegiatan ini terdiri dari :

- a. 7 Sertifikat CPIB Kapal Perikanan dengan masa berlaku 2 tahun. Sebanyak 7 sertifikat telah terbit pada bulan Juni 2025.

Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14,070,000.

Indikator Kinerja Utama ini sudah dilaksanakan pada tahun 2024 tahun ini dengan total capaian 100% dari target pada Triwulan II 70% persentase 120% melebihi target dari yang sudah ditetapkan.

Pada Semester I Tahun 2025, Stasiun KIPM Kendari hanya melaksanakan 1 (satu) jenis layanan sertifikasi, yaitu Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di Kapal Perikanan. Kegiatan ini berhasil dilaksanakan dengan capaian 100% dari target tahunan dan bahkan mencapai 120% pada Triwulan II, sehingga menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Keberhasilan ini didukung oleh:

1. Tingginya tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap penerapan standar mutu dan keamanan hasil perikanan.
2. Koordinasi yang efektif antara Stasiun KIPM Kendari dengan pengelola pelabuhan perikanan (PPS Kendari dan PPI Sodohoa Kendari).
3. Kesiapan SDM pengendali mutu dalam melaksanakan inspeksi dan verifikasi CPIB di atas kapal.

Tidak terdapat kegagalan dalam pelaksanaan indikator ini. Namun demikian, keterbatasan jenis sertifikasi yang dilaksanakan menunjukkan bahwa ruang lingkup layanan sertifikasi masih dapat dikembangkan pada periode berikutnya.

Sebagai alternatif solusi atas potensi keterbatasan tersebut, Stasiun KIPM Kendari telah melakukan:

- Sosialisasi kepada pelaku usaha terkait peluang sertifikasi lainnya.
- Pendampingan teknis awal bagi kapal yang belum memenuhi persyaratan CPIB agar dapat disertifikasi pada periode berikutnya.

Pelaksanaan kegiatan sertifikasi CPIB Kapal Perikanan didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp14.070.000, yang digunakan secara efisien dan tepat sasaran untuk kegiatan inspeksi dan penerbitan sertifikat. Efisiensi penggunaan sumber daya tercermin dari:

1. Optimalisasi perjalanan dinas, dengan pelaksanaan inspeksi pada beberapa kapal dalam satu lokasi dan waktu yang berdekatan.
2. Pemanfaatan SDM internal secara maksimal, tanpa memerlukan tenaga tambahan dari luar satuan kerja.
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah tersedia, sehingga tidak menimbulkan biaya tambahan yang signifikan.

Dengan realisasi output berupa 7 Sertifikat CPIB Kapal Perikanan yang seluruhnya terbit tepat waktu pada bulan Juni 2025, penggunaan anggaran dinilai efektif dan efisien serta memberikan dampak langsung terhadap peningkatan mutu hasil perikanan.

Untuk meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya, Stasiun KIPM Kendari merekomendasikan beberapa upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Peningkatan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha perikanan terkait penerapan CPIB di atas kapal.
2. Perluasan cakupan layanan sertifikasi, tidak hanya terbatas pada CPIB Kapal Perikanan tetapi juga sertifikasi lainnya sesuai kewenangan KIPM.
3. Penguatan perencanaan target triwulanan, agar distribusi capaian kinerja lebih merata sepanjang tahun.
4. Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi, khususnya terhadap kapal yang belum memenuhi persyaratan CPIB agar dapat disertifikasi pada periode berikutnya.

Dengan upaya tersebut, diharapkan kinerja sertifikasi pada triwulan berikutnya dapat meningkat secara berkelanjutan serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan daya saing produk perikanan.

Untuk perbandingan target dan capaian realisasi setiap triwulan serta Renstra 2024-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Target dan Realisasi Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari

Realisasi Tahun 2024		Tahun 2025							Renstra 2024-2029		
TW II	2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2025	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	Target 2025	% Capaian thd Target
70	100	0	70	100	120	0	70	100	70	70	120

2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari

- Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.
- Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.
- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:
 - Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - Standar Internasional (Codex Alimentarius);
 - Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

- e. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Cara Pengukuran :

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)

A (Persentase Penerbitan Sertifikat HACCP) = **100%**

B (Persentase Penerbitan Sertifikat SKP) = **72,41%**

$$\%X = \frac{A+B}{Xn} \times 100\%$$

$$\%X = \frac{100+72,41}{2} \times 100\%$$

$$\%X = \mathbf{86,21\%}$$

Pada Triwulan II tahun 2025 Stasiun KIPM Kendari hanya melakukan sertifikasi terhadap 2 jenis sertifikasi yaitu :

- a. Sertifikat HACCP
- b. Sertifikat SKP

Output dari kegiatan ini terdiri dari :

Output dari kegiatan ini terdiri dari :

- a. 7 Sertifikat HACCP dari 4 Unit Pengolahan Ikan yaitu : CV. Anugerah Dua Putra dengan jenis produk *Fresh Shrimp* (tanggal inspeksi 21 April 2025), CV. Anugrah Bahari Kendari dengan jenis produk *Fresh Pelagic Fish* dan *Fresh Demersal Fish* (tanggal inspeksi 19 Mei 2025), PT. Asia Bahari Fishery dengan jenis produk *Fresh Pelagic Fish* dan *Fresh Demersal Fish* (tanggal inspeksi 04 Juni 2025), dan PT. Grahamakmur Ciptapratama dengan jenis produk *Frozen Shrimp* (tanggal inspeksi 19 Mei 2025) dan *Frozen Demersal Fish* (tanggal inspeksi 18 Juni 2025).
- b. 21 Sertifikat SKP dari 6 Unit Pengolahan Ikan yaitu : PT. Asia Bahari Fishery dengan jenis produk *Fresh Pelagic Fish* dan *Fresh Demersal Fish* (tanggal

inspeksi 24 Maret 2025), CV. Anugrah Bahari Kendari dengan jenis produk *Fresh Pelagic Fish* dan *Fresh Demersal Fish* (tanggal inspeksi 27 Maret 2025), CV. Alfaraya Mitra Bahari dengan jenis produk *Frozen Pelagic Fish*, *Frozen Demersal Fish*, dan *Frozen Cephalopods* (tanggal inspeksi 22 April 2025), KSU Adi Jaya Lestari dengan jenis produk *Fresh Shellfish*, *Frozen Shellfish*, *Frozen Cephalopod*, *Frozen Tuna*, *Frozen Sea Snail*, *Frozen Pelagic Fish*, dan *Frozen Demersal Fish*, PT. Arta Mina Jaya dengan jenis produk *Fresh Tuna*, *Frozen Tuna*, *Frozen Cephalopods*, *Frozen Pelagic Fish* dan *Frozen Demersal Fish* dan *Fresh Demersal Fish*, PT. Andalan Nelaayan Indonesia dengan jenis produk *Pasteurized Crab Meat* (tanggal inspeksi 18 Juni 2025).

Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran kegiatan SKP sebesar Rp. 33.240.000 dengan realisasi sebesar Rp. 9.057.000 atau 28% dan kegiatan HACCP sebesar Rp.46.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 18.679.900 atau 51,95%

Indikator Kinerja Utama ini sudah dilaksanakan pada tahun 2024 tahun ini dengan total capaian 86,21% dari target pada Triwulan II 70% persentase 120% melebihi target dari yang sudah ditetapkan.

Pada Triwulan II Tahun 2025, Stasiun KIPM Kendari melaksanakan 2 (dua) jenis layanan sertifikasi, yaitu Sertifikat HACCP dan Sertifikat SKP. Pelaksanaan indikator kinerja ini menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan capaian 120% pada Triwulan II dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 70%. Secara kumulatif, capaian indikator ini mencapai 86,21% dari target tahunan, sehingga menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh:

1. Tingginya komitmen dan kesiapan Unit Pengolahan Ikan (UPI) dalam memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
2. Perencanaan inspeksi yang efektif dan terkoordinasi, sehingga pelaksanaan sertifikasi dapat dilakukan tepat waktu.
3. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar HACCP dan SKP sebagai prasyarat akses pasar, khususnya untuk produk perikanan ekspor.

Tidak terdapat kegagalan yang bersifat signifikan dalam pelaksanaan indikator ini. Namun demikian, masih terdapat UPI yang belum mengajukan sertifikasi akibat keterbatasan pemahaman teknis serta kesiapan sarana prasarana. Sebagai

alternatif solusi, Stasiun KIPM Kendari telah melakukan pendampingan teknis awal dan sosialisasi persyaratan sertifikasi kepada UPI yang belum memenuhi standar.

Pelaksanaan kegiatan sertifikasi pada Triwulan II Tahun 2025 didukung oleh:

- Pagu anggaran kegiatan SKP sebesar Rp33.240.000 dengan realisasi Rp9.057.000 (28%).
- Pagu anggaran kegiatan HACCP sebesar Rp46.000.000 dengan realisasi Rp18.679.900 (51,95%).

Efisiensi penggunaan sumber daya tercermin dari:

1. Optimalisasi jadwal inspeksi, di mana beberapa UPI dilakukan inspeksi dalam satu rangkaian kegiatan perjalanan dinas.
2. Pemanfaatan SDM internal secara optimal, sehingga tidak memerlukan tambahan tenaga pemeriksa dari luar satuan kerja.
3. Penggunaan anggaran secara selektif dan berbasis kebutuhan riil, sehingga capaian output dapat diperoleh meskipun realisasi anggaran belum mencapai pagu maksimal.

Dengan realisasi output berupa 7 Sertifikat HACCP dan 21 Sertifikat SKP, penggunaan anggaran dinilai efektif, efisien, dan memberikan nilai tambah terhadap peningkatan mutu serta daya saing produk perikanan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya, Stasiun KIPM Kendari telah dan akan melakukan beberapa upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan intensitas sosialisasi dan bimbingan teknis kepada UPI terkait penerapan HACCP dan SKP, khususnya bagi UPI baru.
2. Mendorong percepatan pengajuan sertifikasi melalui pendampingan pra-inspeksi agar UPI lebih siap saat dilakukan penilaian.
3. Penguatan perencanaan dan penjadwalan inspeksi triwulanan, guna menjaga konsistensi capaian kinerja sepanjang tahun anggaran.
4. Optimalisasi pemanfaatan anggaran, terutama pada semester berikutnya untuk mendukung perluasan cakupan sertifikasi.
5. Peningkatan monitoring dan evaluasi pasca-sertifikasi, guna memastikan keberlanjutan penerapan sistem jaminan mutu di UPI.

Dengan pelaksanaan upaya perbaikan tersebut, diharapkan kinerja sertifikasi HACCP dan SKP pada tahun-tahun mendatang dapat semakin meningkat dan

berkontribusi terhadap peningkatan kualitas serta daya saing hasil perikanan di wilayah kerja Stasiun KIPM Kendari.

Untuk perbandingan target dan capaian realisasi setiap triwulan serta Renstra 2024-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 3 Target dan Realisasi Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari

Realisasi Tahun 2024		Tahun 2025							Renstra 2024-2029		
TW II	2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2025	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	Target 2025	% Capaian thd Target
70	100	81,82	70	86,21	120	0	70	86,21	70	70	120

Rekomendasi rencana aksi untuk triwulan berikutnya adalah:

1. Evaluasi Kepatuhan: meninjau kembali penerapan HACCP dan SKP di semua unit pengolahan ikan untuk memastikan sudah sesuai standar.
 2. Perbaikan Proses Produksi: meningkatkan proses yang masih berisiko atau kurang efisien agar lebih sesuai standar.
2. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari
- a. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).
 - b. Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.
 - c. Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan

keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Kemanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Cara Pengukuran :

$$x = \frac{A - B}{A} \times 100$$

x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)
 A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP
 B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

Pada Triwulan II tahun 2025 Stasiun KIPM Kendari jumlah HC yang diterbitkan yaitu sebanyak 212 sertifikat dan tidak ada yang ditolak.

Output dari kegiatan ini terdiri dari:

KEBERTERIMAAN IKAN DAN HASIL PERIKANAN KE NEGARA TUJUAN EKSPOR

NAMA UPT : Stasiun KIPM Kendari
BULAN : April 2025

No.	Negara Tujuan Ekspor	Sertifikat (Jumlah)	Keberterimaan Sertifikasi			
			diterima		Tidak diterima (penolakan)	
			(Jumlah)	%	(Jumlah)	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Singapura	50	50	100	-	-
2	United State	12	12	100		
3	Mexico	1	1	100		
	JUMLAH	63	63	100	-	-

KEBERTERIMAAN IKAN DAN HASIL PERIKANAN KE NEGARA TUJUAN EKSPOR

NAMA UPT : Stasiun KIPM Kendari
BULAN : Mei 2025

No.	Negara Tujuan Ekspor	Sertifikat (Jumlah)	Keberterimaan Sertifikasi			
			diterima		Tidak diterima (penolakan)	
			(Jumlah)	%	(Jumlah)	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Singapura	68	68	100	-	-
2	United State	12	12	100		
3	Japan	1	1	100		
	JUMLAH	81	81	100	-	-

**KEBERTERIMAAN IKAN DAN HASIL PERIKANAN
KE NEGARA TUJUAN EKSPOR**

NAMA UPT : Stasiun KIPM Kendari
BULAN : Juni 2025

No.	Negara Tujuan Ekspor	Sertifikat (Jumlah)	Keberterimaan Sertifikasi			
			diterima		Tidak diterima (penolakan)	
			(Jumlah)	%	(Jumlah)	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Singapura	63	63	100	-	-
2	United State	3	3	100		
3	Thailand	2	2	100		
	JUMLAH	68	68	100	-	-

Untuk melaksanakan kegiatan ini sumber dana disesuaikan dengan kebutuhan karena masih terdapat blokir efisiensi anggaran kebijakan pemerintah pusat.

Total capaian 100 % karena Jumlah HC ekspor yang memenuhi syarat kesehatan sama dengan jumlah Jumlah HC ekspor mutu capaiannya 100% karena jumlah Frekuensi HC ekspor yang memenuhi syarat mutu sama dengan jumlah HC mutu ekspor yang diterbitkan dan tidak ada penolakan dari negara tujuan.

Pada Triwulan II Tahun 2025, Stasiun KIPM Kendari telah menerbitkan 212 Health Certificate (HC) ekspor dan seluruhnya memenuhi persyaratan kesehatan dan mutu, sehingga tidak terdapat penolakan dari negara tujuan ekspor. Capaian ini menunjukkan bahwa jumlah HC ekspor yang memenuhi syarat kesehatan dan mutu sama dengan jumlah HC yang diterbitkan, sehingga indikator kinerja ini mencapai 100%. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut didukung oleh:

1. Kepatuhan tinggi pelaku usaha ekspor terhadap ketentuan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
2. Konsistensi penerapan sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan oleh Unit Pengolahan Ikan (UPI).

3. Pelaksanaan pemeriksaan dokumen dan fisik yang akurat dan tepat waktu oleh petugas Stasiun KIPM Kendari.

Tidak terdapat kegagalan ataupun penurunan kinerja pada indikator ini. Seluruh permohonan HC yang diajukan telah memenuhi persyaratan teknis dan administratif. Sebagai langkah antisipatif terhadap potensi kendala di masa mendatang, Stasiun KIPM Kendari tetap melakukan pendampingan dan konsultasi teknis kepada pelaku usaha sebelum pengajuan HC.

Pelaksanaan penerbitan HC pada Triwulan II Tahun 2025 dilaksanakan dengan pendanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan riil, mengingat masih terdapat blokir efisiensi anggaran sebagai dampak kebijakan pemerintah pusat.

Efisiensi penggunaan sumber daya tercermin dari:

1. Optimalisasi proses layanan penerbitan HC berbasis sistem, sehingga meminimalkan penggunaan sumber daya tambahan.
2. Pemanfaatan SDM secara efektif, tanpa penambahan beban anggaran meskipun volume layanan cukup tinggi.
3. Pengendalian biaya operasional, sehingga layanan tetap berjalan optimal meskipun dalam keterbatasan anggaran.

Dengan capaian output berupa 212 HC ekspor yang diterbitkan tanpa penolakan, penggunaan sumber daya dinilai efektif dan efisien, serta tetap menjamin kualitas layanan dan kepatuhan terhadap persyaratan negara tujuan.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode berikutnya, Stasiun KIPM Kendari telah dan akan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Mempertahankan konsistensi pengawasan dan verifikasi mutu serta kesehatan terhadap produk perikanan ekspor.
2. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pelaku usaha ekspor, khususnya terkait pemenuhan persyaratan negara tujuan.
3. Optimalisasi pemanfaatan sistem layanan digital, guna mempercepat proses penerbitan HC.
4. Penguatan monitoring dan evaluasi, terutama terhadap potensi perubahan regulasi negara tujuan ekspor.
5. Pengajuan penyesuaian kebutuhan anggaran berbasis beban kerja, agar layanan penerbitan HC tetap optimal meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran.

Dengan upaya perbaikan tersebut, diharapkan kinerja penerbitan Health Certificate (HC) ekspor pada periode berikutnya dapat terus terjaga, mendukung kelancaran ekspor, serta meningkatkan kepercayaan negara tujuan terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan Indonesia.

Untuk perbandingan target dan capaian realisasi setiap triwulan serta Renstra 2024-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 4 Target dan Realisasi Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari

Realisasi Tahun 2024		Tahun 2025							Renstra 2024-2029		
TW II	2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2025	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	Target 2025	% Capaian thd Target
100	100	100	99	100	101,01	0	99	100	99	99	100

2. Sasaran Kegiatan

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Memperkuat kapasitas kelembagaan Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Melalui sasaran ini, diharapkan tercipta sistem pengawasan mutu yang adaptif terhadap perkembangan industri, berbasis teknologi informasi, dan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kegiatan ini juga diarahkan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, menyederhanakan prosedur birokrasi, mempercepat layanan sertifikasi mutu, serta memperkuat sinergi lintas sektor untuk menjamin mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan. Dengan demikian, dapat lebih responsif terhadap dinamika global, mempercepat waktu respons terhadap masalah mutu, serta meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia di pasar nasional maupun internasional, sekaligus mendukung pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

$$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

Pada Semester I tahun 2025 Stasiun KIPM Kendari Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari sebesar 81,90 dari 85

Output dari kegiatan ini terdiri dari:

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari adalah 81,90 dari 85 atau 96,35% belum memenuhi target

Untuk melaksanakan kegiatan ini sumber dana disesuaikan dengan kebutuhan karena masih terdapat blokir efisiensi anggaran kebijakan pemerintah pusat.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS I KENDARI

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	060	032	567694	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI	Nilai	100.00	78.41	100.00	100.00	100.00	78.55	49.15	81.90	100%	0.00	81.90
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.76	20.00	10.00	10.00	7.86	12.29				
					Nilai Aspek	89.21		94.64				49.15				

Target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari adalah 85. Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari pada Triwulan II adalah 81,90 atau sebesar 96,35%.

Pada Semester I Tahun 2025, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari mencapai nilai 81,90 dari target 85 atau sebesar 96,35%, sehingga belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan.

Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa aspek pengelolaan anggaran yang memerlukan perbaikan. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang menyebabkan adanya blokir sebagian anggaran, sehingga berdampak pada:

1. Penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan.
2. Penundaan realisasi beberapa belanja yang telah direncanakan.
3. Penurunan nilai pada beberapa komponen penilaian IKPA.

Sebagai alternatif solusi atas kondisi tersebut, Stasiun KIPM Kendari telah melakukan penyesuaian rencana pelaksanaan kegiatan dan penganggaran agar tetap selaras dengan kebijakan pemerintah pusat tanpa mengganggu pencapaian output utama.

Pelaksanaan anggaran Semester I Tahun 2025 dilaksanakan dengan pendekatan kehati-hatian dan efisiensi, dengan sumber dana yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan riil kegiatan serta mempertimbangkan kondisi blokir anggaran.

Efisiensi penggunaan sumber daya tercermin dari:

1. Prioritisasi kegiatan strategis dan wajib, sehingga output utama tetap tercapai.
2. Pengendalian realisasi anggaran secara selektif, terutama pada belanja yang dapat ditunda.
3. Optimalisasi koordinasi internal, guna memastikan setiap realisasi anggaran memberikan nilai tambah terhadap kinerja organisasi.

Meskipun nilai IKPA belum mencapai target maksimal, pengelolaan anggaran tetap dinilai efektif dan efisien dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun KIPM Kendari.

Dalam rangka meningkatkan capaian IKPA pada periode berikutnya, Stasiun KIPM Kendari telah dan akan melakukan beberapa upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Penguatan perencanaan anggaran berbasis kinerja, agar lebih adaptif terhadap kebijakan efisiensi anggaran.
2. Peningkatan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala, khususnya pada indikator penilaian IKPA.
3. Percepatan pelaksanaan kegiatan yang tidak terdampak blokir anggaran, untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran.
4. Peningkatan koordinasi dengan unit pembina dan KPPN, guna meminimalkan kendala administrasi dan teknis.
5. Penyusunan langkah antisipatif terhadap kebijakan anggaran tahun berjalan, agar pelaksanaan anggaran tetap optimal dan tepat waktu.

Dengan pelaksanaan upaya perbaikan tersebut, diharapkan nilai IKPA Stasiun KIPM Kendari pada semester berikutnya dapat meningkat dan mencapai target yang telah ditetapkan, tanpa mengesampingkan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah.

Untuk perbandingan target dan capaian realisasi setiap triwulan serta Renstra 2024-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 5 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari

Realisasi Tahun 2024		Tahun 2025							Renstra 2024-2029		
TW II	2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaika thd TW I	Target PK 2025	% Realisa sithd Target PK	Target 2024	Target 2025	% Capaian thd Target
85	85,20	100	85	81,90	96,35	-	85	81,90	85	85	96,35

2. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Formula Perhitungan:

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

UPT Stasiun KIPM Kendari adalah 83,33 atau 111,11.

Untuk melaksanakan kegiatan ini sumber dana disesuaikan dengan kebutuhan karena masih terdapat blokir efisiensi anggaran kebijakan pemerintah pusat.

IP ASN 2025

Dashboard
Eselon
Pegawai
FAQ
IP ASN 2024

Silakan ketik Nama Unit Kerja...

Cari

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase		
16	BALAI KIPM SEMARANG	29	23,28	93.12 %	30,34	75.85 %	25	83.33 %	5	100 %	83.62	TINGGI
17	BALAI KIPM BANJARBARA	14	21,43	85.72 %	33,14	82.85 %	25	83.33 %	5	100 %	84.57	TINGGI
18	BALAI KIPM LAMPUNG	29	23,28	93.12 %	31,26	78.15 %	25,17	83.9 %	5	100 %	84.71	TINGGI
19	BALAI KIPM AMBON	14	22,14	88.56 %	31,54	78.85 %	25	83.33 %	5	100 %	83.68	TINGGI
20	BALAI KIPM ENTRONG	7	21,43	85.72 %	25,71	64.28 %	25	83.33 %	5	100 %	77.34	SEDANG
21	BALAI KIPM TANJUNG PINANG	11	22,27	89.08 %	30,75	76.88 %	25	83.33 %	5	100 %	83.02	TINGGI
22	BALAI KIPM TAKARAN	14	21,07	84.28 %	30,11	75.28 %	25	83.33 %	5	100 %	81.18	TINGGI
23	STASIUN KIPM PALEMBANG	22	22,73	90.92 %	30,09	75.22 %	27,5	91.67 %	5	100 %	85.32	TINGGI
24	STASIUN KIPM BANDUNG	9	23,89	95.56 %	32,25	80.63 %	28,33	94.43 %	5	100 %	89.47	TINGGI
25	STASIUN KIPM MERAUKE	13	20,77	83.08 %	33,15	82.88 %	25	83.33 %	5	100 %	83.92	TINGGI
26	STASIUN KIPM PONTIANAK	17	22,65	90.8 %	30,49	76.22 %	22,08	73.53 %	4,76	95.2 %	79.96	SEDANG
27	STASIUN KIPM KENDARI	13	21,54	86.16 %	31,79	79.47 %	25	83.33 %	5	100 %	83.33	TINGGI
28	STASIUN KIPM BATAMI	8	24,38	97.52 %	32,31	80.78 %	25	83.33 %	5	100 %	86.69	TINGGI
29	STASIUN KIPM PADANG	13	22,31	89.24 %	30,23	75.58 %	25	83.33 %	5	100 %	82.54	TINGGI
30	STASIUN KIPM JAMBI	15	22,33	89.32 %	29,67	74.17 %	25	83.33 %	5	100 %	82	TINGGI

Target Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari adalah 75. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari pada Triwulan II adalah 83,33 atau sebesar 111,11%.

Pada Triwulan II Tahun 2025, Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari mencapai 83,33 dari target 75, atau sebesar 111,11%, sehingga melampaui

target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas profesionalitas ASN dibandingkan target kinerja yang direncanakan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh:

1. Peningkatan kompetensi ASN melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan tugas dan fungsi.
2. Pemenuhan kewajiban pengembangan kompetensi ASN, baik secara klasikal maupun nonklasikal.
3. Peningkatan kepatuhan terhadap pengelolaan kinerja dan disiplin ASN, termasuk pemutakhiran data kepegawaian secara berkala.

Tidak terdapat kegagalan ataupun penurunan kinerja pada indikator ini. Capaian yang melebihi target menunjukkan bahwa kebijakan pembinaan dan pengembangan ASN telah berjalan dengan efektif. Sebagai alternatif solusi untuk menjaga konsistensi capaian, Stasiun KIPM Kendari terus melakukan monitoring terhadap pemenuhan indikator pembentuk IPASN.

Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN pada Triwulan II Tahun 2025 dilaksanakan dengan pemanfaatan sumber daya secara efisien, tanpa memerlukan tambahan anggaran yang signifikan.

Efisiensi penggunaan sumber daya tercermin dari:

1. Optimalisasi pelatihan berbasis daring dan internal, sehingga mengurangi kebutuhan biaya pelatihan eksternal.
2. Pemanfaatan waktu kerja secara efektif, melalui pengaturan jadwal pengembangan kompetensi yang terintegrasi dengan tugas harian ASN.
3. Sinergi antarunit kerja, khususnya dalam pembinaan kinerja dan pemutakhiran data kepegawaian.

Dengan capaian IPASN yang melebihi target, penggunaan sumber daya dinilai efektif dan efisien, serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan organisasi.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian Indeks Profesionalitas ASN pada periode berikutnya, Stasiun KIPM Kendari telah dan akan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Mendorong ASN untuk terus mengikuti pengembangan kompetensi, baik teknis, manajerial, maupun sosial kultural.
2. Memperkuat pembinaan kinerja dan disiplin ASN, melalui monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.

3. Memastikan pemutakhiran data ASN secara berkelanjutan, agar seluruh komponen pembentuk IPA dapat terukur secara akurat.
4. Menyusun rencana pengembangan kompetensi ASN secara terarah dan berkelanjutan, sesuai kebutuhan organisasi.
5. Meningkatkan peran pimpinan dalam pembinaan profesionalitas ASN, guna menjaga konsistensi capaian indikator.

Dengan pelaksanaan upaya dan rekomendasi perbaikan tersebut, diharapkan Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari dapat terus meningkat dan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Untuk perbandingan target dan capaian realisasi setiap triwulan serta Renstra 2024-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 6 Target dan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari

Realisasi Tahun 2024		Tahun 2025							Renstra 2024-2029		
TW II	2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW IV	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	Target 2025	% Capaian thd Target
81	88,92	0	75	83,33	111,11	-	75	83,33	81	87	111,11

3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari

- 1) Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan II tahun 2023 s.d Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan.
- 2) Nilai Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Lingkup BPPMHKP menggunakan nilai Eselon I BPPMHKP.

Pengukuran :

$$\frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100$$

$\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti

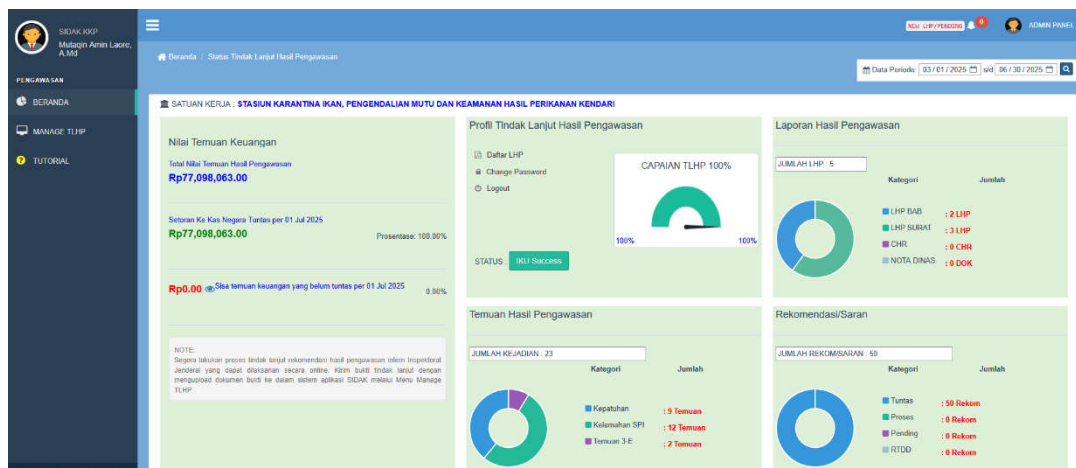
$\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan

Pada Triwulan II tahun 2025 Stasiun KIPM Kendari rekomendasi hasil pengawasan ltjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) 100%.

Output dari kegiatan ini terdiri dari:

rekomendasi hasil pengawasan ltjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) 100%.

Untuk melaksanakan kegiatan ini sumber dana disesuaikan dengan kebutuhan karena masih terdapat blokir efisiensi anggaran kebijakan pemerintah pusat.



Target Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari adalah 85%. Realisasi Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari pada Triwulan II adalah 100% atau sebesar 120%.

Pada Triwulan II Tahun 2025, Indikator Kinerja Utama (IKU) tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal (Itjen) di Stasiun KIPM Kendari menunjukkan kinerja yang sangat baik. Seluruh rekomendasi hasil pengawasan ltjen telah ditindaklanjuti secara tuntas dengan status tindak lanjut TUNTAS, sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

Keberhasilan pencapaian ini menunjukkan komitmen Stasiun KIPM Kendari dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), penguatan sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak terdapat rekomendasi yang tertunda maupun yang belum ditindaklanjuti, sehingga tidak terjadi penurunan kinerja dibandingkan periode sebelumnya.

Kondisi keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi pemerintah pusat tidak menjadi hambatan signifikan dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi, karena kegiatan lebih menitikberatkan pada perbaikan administrasi, penguatan prosedur, serta koordinasi internal.

Sebagai langkah antisipatif, Stasiun KIPM Kendari telah menerapkan mekanisme pengendalian dan pemantauan internal untuk memastikan setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.

Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Itjen pada Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya, khususnya dalam kondisi keterbatasan anggaran. Efisiensi tersebut dicapai melalui:

1. Pemanfaatan sumber daya internal secara optimal tanpa memerlukan tambahan biaya yang signifikan.
2. Penggunaan anggaran berbasis kebutuhan riil, disesuaikan dengan karakter rekomendasi yang bersifat administratif dan penguatan sistem.
3. Koordinasi dan komunikasi internal yang efektif, sehingga proses tindak lanjut dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.

Dengan pendekatan tersebut, seluruh rekomendasi dapat dituntaskan dengan capaian maksimal tanpa membebani anggaran, sejalan dengan kebijakan efisiensi pemerintah pusat.

Untuk menjaga keberlanjutan capaian kinerja dan mencegah terulangnya temuan serupa di masa mendatang, Stasiun KIPM Kendari telah dan akan melakukan beberapa upaya perbaikan, antara lain:

1. Memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui peningkatan kepatuhan terhadap prosedur dan standar operasional.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan.
3. Meningkatkan koordinasi antar unit kerja, khususnya dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan.

4. Membangun budaya kepatuhan dan akuntabilitas, agar rekomendasi pengawasan dapat dicegah sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Dengan upaya tersebut, diharapkan Stasiun KIPM Kendari dapat mempertahankan capaian kinerja IKU tindak lanjut rekomendasi pengawasan Itjen pada level optimal serta mendukung peningkatan kualitas tata kelola organisasi secara berkelanjutan.

Untuk perbandingan target dan capaian realisasi setiap triwulan serta Renstra 2024-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 7 Target dan Realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari

Realisasi Tahun 2024		Tahun 2025							Renstra 2024-2029		
TW II	2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW IV	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	Target 2025	% Capaian thd Target
85	100	100	85	100	120	-	85	100	100	100	100

4. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Pengukuran:

Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP = $\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Pada Triwulan II tahun 2025 Stasiun KIPM Kendari Rekapitulasi Rencana Umum PBJ Terumumkan adalah 100%.

Output dari kegiatan ini terdiri dari:

Rekapitulasi Rencana Umum PBJ Terumumkan adalah 100%.

Untuk melaksanakan kegiatan ini sumber dana disesuaikan dengan kebutuhan karena masih terdapat blokir efisiensi anggaran kebijakan pemerintah pusat.

NO	Nama Satker	PAGU PENGADAAN (sumber data : Menu RUP - SIRUP)			PAGU TERUMUMKAN (sumber data : Rekap RUP Terumumkan - SIRUP)			% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	BALAI KIPMHPK SURABAYA I	4.601.969,000	-	4.601.969,000	4.601.969,000	-	4.601.969,000	0	100,00%
2	BALAI KIPMHPK MEDAN I	2.227.785,000	-	2.227.785,000	2.227.785,000	-	2.227.785,000	0	100,00%
3	BALAI BESAR KIPMHPK MAKASSAR	2.892.982,000	-	2.892.982,000	2.892.982,000	-	2.892.982,000	0	100,00%
4	BALAI KIPMHPK DENPASAR	1.784.010,000	-	1.784.010,000	1.784.010,000	-	1.784.010,000	0	100,00%
5	STASIUN KIPMHPK BATAM	1.351.261,698	-	1.351.261,698	1.351.261,698	-	1.351.261,698	0	100,00%
6	SEKRETARIAT BADAN KIPMHPK	5.563.552,000	-	5.563.552,000	5.563.552,000	-	5.563.552,000	0	100,00%
7	STASIUN KIPMHPK PADANG	744.295,000	-	744.295,000	744.295,000	-	744.295,000	0	100,00%
8	STASIUN KIPMHPK PEKANBARU	392.002,000	-	392.002,000	392.002,000	-	392.002,000	0	100,00%
9	STASIUN KIPMHPK PALEMBANG	687.840,000	-	687.840,000	687.840,000	-	687.840,000	0	100,00%
10	STASIUN KIPMHPK PONTIANAK	1.490.057,000	-	1.490.057,000	1.490.057,000	-	1.490.057,000	0	100,00%
11	BALAI KIPMHPK BALIKPAPAN	440.437,000	-	440.437,000	440.437,000	-	440.437,000	0	100,00%
12	BALAI KIPMHPK MANADO	1.711.693,000	-	1.711.693,000	1.711.693,000	-	1.711.693,000	0	100,00%
13	STASIUN KIPMHPK KENDARI	351.241,000	-	351.241,000	351.241,000	-	351.241,000	0	100,00%
14	BALAI KIPMHPK MATARAM	1.082.514,000	-	1.082.514,000	1.082.514,000	-	1.082.514,000	0	100,00%
15	BALAI KIPMHPK JAYAPURA	399.150,000	-	399.150,000	399.150,000	-	399.150,000	0	100,00%
16	STASIUN KIPMHPK MAMUJU	35.000,000	-	35.000,000	35.000,000	-	35.000,000	0	100,00%
17	STASIUN KIPMHPK KUPANG	-	58.810,000	58.810,000	-	58.810,000	58.810,000	0	100,00%
18	BALAI KIPMHPK TARAKAN	154.755,800	-	154.755,800	154.755,800	-	154.755,800	0	100,00%
19	STASIUN KIPMHPK ACEH	1.035.194,000	-	1.035.194,000	1.035.194,000	-	1.035.194,000	0	100,00%
20	BALAI KIPMHPK BANJARMASIN	565.163,000	-	565.163,000	565.163,000	-	565.163,000	0	100,00%

Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari sesuai target yang tertuang dalam perjanjian kinerja Triwulan II tahun 2025 yaitu 76% dilaksanakan setiap setiap akhir tahun dan telah mencapai realisasi sebesar 100% Kegiatan ini telah melebihi target dalam perjanjian kinerja, sesuai Nota Dinas Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Nomor 86/SJ.7/PL.410/VII/2025 tanggal 9 Juli 2025 perihal Penyampaian hasil perhitungan Capaian Indikator Kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 2 tahun anggaran 2025. Dalam kegiatan IKU Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari tidak ada kendala sehingga dalam prosesnya dapat berjalan dengan baik.

Pada Triwulan II Tahun 2025, Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari mencapai realisasi 100%, melampaui target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja sebesar

76%. Dengan demikian, indikator kinerja ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melebihi target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh:

1. Kepatuhan unit kerja terhadap ketentuan pengumuman RUP PBJ, sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2. Koordinasi yang efektif antara Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, dan pengelola SIRUP, sehingga seluruh paket pengadaan dapat diumumkan tepat waktu.
3. Perencanaan pengadaan yang matang, sehingga tidak terjadi perubahan signifikan terhadap paket pengadaan yang telah direncanakan.

Tidak terdapat kegagalan maupun penurunan kinerja pada indikator ini. Seluruh proses pengumuman RUP PBJ berjalan dengan baik tanpa kendala, sebagaimana dikonfirmasi melalui Nota Dinas Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Nomor 86/SJ.7/PL.410/VII/2025 tanggal 9 Juli 2025 tentang Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase RUP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan II Tahun Anggaran 2025.

Pelaksanaan pengumuman RUP PBJ pada SIRUP dilaksanakan dengan pemanfaatan sumber daya yang efisien, tanpa memerlukan tambahan anggaran khusus. Efisiensi penggunaan sumber daya tercermin dari:

1. Pemanfaatan sistem SIRUP secara optimal, sehingga proses pengumuman dapat dilakukan secara daring dan tepat waktu.
2. Penggunaan SDM internal secara efektif, dengan pembagian tugas yang jelas antara pengelola pengadaan.
3. Minimnya kebutuhan koordinasi tambahan, karena perencanaan pengadaan telah disusun sejak awal tahun anggaran.

Dengan capaian realisasi 100%, penggunaan sumber daya dinilai efektif dan efisien, serta mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode berikutnya, Stasiun KIPM Kendari telah dan akan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Mempertahankan konsistensi pengumuman RUP PBJ tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan, agar pelaksanaan pengadaan berjalan lebih efektif dan minim perubahan.

3. Memperkuat koordinasi internal antara unit teknis dan pengelola pengadaan.
4. Melakukan pemutakhiran data RUP secara berkala, apabila terdapat penyesuaian kebijakan atau kebutuhan organisasi.
5. Meningkatkan kapasitas SDM pengadaan, melalui pembelajaran mandiri dan berbagi pengetahuan internal.

Dengan upaya dan rekomendasi tersebut, diharapkan capaian indikator Persentase RUP PBJ yang diumumkan pada SIRUP dapat terus dipertahankan dan menjadi dasar pengelolaan pengadaan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Untuk perbandingan target dan realisasi IKU serta renstra 2024-2029 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 8 Target dan Realisasi Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari

Realisasi Tahun 2024		Tahun 2025							Renstra 2024-2029		
TW II	2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW IV	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	Target 2025	% Capaian thd Target
0	0	0	76	100	120	0	76	100	-	76	100

5. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan focus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang PEMBANGUNAN Integritas di Lingkungan KKP.

Cara Pengukuran:

Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen system antikorupsi, yang meliputi :

- a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
- b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
- c. Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15%)
- d. Penanganan benturan kepentingan (bobot 15%)

e. Pelaporan Harta Kekayaan (LHKAN) (bobot 15%)

f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)

Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.

Pada Semester I tahun 2025 Stasiun KIPM Kendari Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari adalah 66,83 atau 120% dari Target 50%

Output dari kegiatan ini terdiri dari:

Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari adalah 66,81 atau 120% dari Target 50%

Untuk melaksanakan kegiatan ini sumber dana disesuaikan dengan kebutuhan karena masih terdapat blokir efisiensi anggaran kebijakan pemerintah pusat.

**LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS
WBK
UNIT KERJA: STASIUN KIPM KENDARI**

Area Perubahan		Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	Persentase	Pemenuhan Nilai Min
A. PENGUNGKIT		60,00					
1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	8,00	2,00	2,25	4,25	53,18%	BELUM SESUAI
2.	PENATAAN TATALAKSANA	7,00	1,27	0,67	1,93	27,60%	BELUM SESUAI
3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10,00	2,81	3,50	6,31	63,06%	OK
4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	10,00	4,17	4,01	8,18	81,77%	OK
5.	PENGUATAN PENGAWASAN	15,00	3,92	5,59	9,51	63,37%	OK
6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10,00	2,58	0,00	2,58	25,82%	BELUM SESUAI
TOTAL PENGUNGKIT					32,76	54,59%	BELUM SESUAI
B. HASIL		40,00					
I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL		22,50			18,13	80,56%	OK
a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17,50			13,13	75,00%	OK
b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00			5,00	100,00%	OK
II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA		17,50			15,93	91,00%	
-	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17,50			15,93	91,00%	OK
TOTAL HASIL					34,05	85,13%	
NILAI EVALUASI ZONA INTEGRITAS					66,81		BELUM SESUAI

Target Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari adalah 50. Realisasi Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari pada Triwulan II adalah 66,81 atau sebesar 120%.

Pemenuhan dokumen pembangunan Zona Integritas pada Triwulan II Tahun 2025 dilaksanakan dengan pemanfaatan sumber daya yang efisien, tanpa memerlukan tambahan anggaran yang signifikan.

Efisiensi penggunaan sumber daya tercermin dari:

1. Optimalisasi SDM internal, khususnya Tim ZI, dalam penyusunan dan pengelolaan dokumen.

2. Pemanfaatan dokumen dan data yang telah tersedia, sehingga meminimalkan duplikasi pekerjaan.
3. Pelaksanaan koordinasi secara efektif, baik melalui pertemuan langsung maupun media daring.

Dengan capaian realisasi yang melebihi target, penggunaan sumber daya dinilai efektif dan efisien, serta mendukung percepatan pembangunan Zona Integritas.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian pembangunan Zona Integritas, Stasiun KIPM Kendari telah dan akan melakukan upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dokumen ZI, tidak hanya pada aspek kelengkapan tetapi juga substansi.
2. Memperkuat implementasi hasil pembangunan ZI, agar tidak berhenti pada pemenuhan dokumen semata.
3. Melakukan evaluasi internal secara berkelanjutan, terhadap enam area perubahan ZI.
4. Meningkatkan pemahaman pegawai terkait ZI, melalui sosialisasi dan pembinaan internal.
5. Mempersiapkan tahapan lanjutan menuju WBK/WBBM, dengan pemenuhan indikator secara lebih komprehensif.

Dengan upaya dan rekomendasi perbaikan tersebut, diharapkan pembangunan Zona Integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari dapat terus berkelanjutan dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik.

Untuk perbandingan target dan capaian realisasi setiap triwulan serta Renstra 2024-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 9 Target dan Realisasi Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari

Realisasi Tahun 2024		Tahun 2025							Renstra 2024-2029		
TW II	2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW IV	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	Target 2025	% Capaian thd Target
0	0	0	50	66,81	120	-	50	66,81	0	50	66,81

6. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
- Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.
- Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP.

Pengukuran:

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai penimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: $\text{IKM unit pelayanan} \times 25$

Pada Triwulan II tahun 2025 Stasiun KIPM Kendari Nilai SKM adalah 93,77 atau 106,56% dari Target 88 sehingga tercapai

Output dari kegiatan ini terdiri dari:

Nilai SKM adalah 93,77 atau 106,56% mencapai target

Untuk melaksanakan kegiatan ini sumber dana disesuaikan dengan kebutuhan karena masih terdapat blokir efisiensi anggaran kebijakan pemerintah pusat.

NO	UNIT PELAYANAN PUBLIK	NILAI PER-UNSUR									IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9				
30	Stasiun KIPM Cirebon	93.75	93.36	94.14	94.92	94.14	92.97	93.75	94.14	93.75	93.88	A	Sangat Baik	64
31	Stasiun KIPM Kendari	95.54	95.54	93.75	94.64	92.86	91.96	95.54	91.96	92.86	93.85	A	Sangat Baik	28
32	Balai Uji Standar KIPM	95.19	94.23	94.23	94.23	94.23	92.31	92.31	92.31	95.19	93.80	A	Sangat Baik	26

Nilai SKM 93,77 atau 106,56% sesuai Surat Sekretaris BPPMHKP Nomor B.3095/BPPMHKP.1/HM.450/VII/2025 Tanggal 10 Juli 2025 Hal Penyampaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) BPPMHKP Triwulan II Tahun 2025.

Pada Triwulan II Tahun 2025, Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup Stasiun KIPM Kendari mencapai 93,77 dari target 88, atau sebesar 106,56%, sehingga indikator kinerja ini tercapai dan melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut sesuai dengan Surat Sekretaris BPPMHKP Nomor B.3095/BPPMHKP.1/HM.450/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025 tentang Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BPPMHKP Triwulan II Tahun 2025.

Keberhasilan pencapaian indikator ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Stasiun KIPM Kendari dinilai sangat baik oleh masyarakat pengguna layanan. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan tersebut antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan prima, baik dari aspek kecepatan, ketepatan, maupun keramahan petugas.
2. Kepatuhan terhadap standar pelayanan, termasuk transparansi persyaratan dan prosedur layanan.
3. Responsivitas petugas dalam menangani pengaduan dan permohonan layanan.

Tidak terdapat kegagalan maupun penurunan kinerja pada indikator ini. Seluruh layanan yang diberikan mampu memenuhi ekspektasi pengguna jasa. Sebagai langkah antisipasi, Stasiun KIPM Kendari tetap melakukan pemantauan dan evaluasi hasil SKM guna mengidentifikasi aspek pelayanan yang masih dapat ditingkatkan.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada Triwulan II Tahun 2025 dilaksanakan dengan pemanfaatan sumber daya yang efisien, tanpa memerlukan tambahan anggaran yang signifikan.

Efisiensi penggunaan sumber daya tercermin dari:

1. Pemanfaatan instrumen survei yang terstandar dan terintegrasi, sehingga pelaksanaan survei dapat dilakukan secara efektif.
2. Optimalisasi SDM internal, dalam pengelolaan dan pengolahan data survei.
3. Pemanfaatan hasil survei sebagai bahan evaluasi, sehingga memberikan nilai tambah terhadap peningkatan kualitas pelayanan.

Dengan capaian Nilai SKM yang melampaui target, penggunaan sumber daya dinilai efektif dan efisien serta berdampak langsung terhadap peningkatan kepuasan masyarakat.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depan, Stasiun KIPM Kendari telah dan akan melakukan upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Mempertahankan standar pelayanan yang telah berjalan dengan baik, khususnya pada aspek kecepatan dan keramahan layanan.
2. Menindaklanjuti masukan dan saran dari responden SKM, sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.
3. Meningkatkan kompetensi petugas layanan, melalui pembinaan dan evaluasi kinerja secara berkala.
4. Penguatan budaya pelayanan prima, sebagai bagian dari pembangunan Zona Integritas.
5. Monitoring dan evaluasi SKM secara berkelanjutan, untuk memastikan konsistensi kualitas layanan.

Dengan pelaksanaan upaya dan rekomendasi perbaikan tersebut, diharapkan Nilai SKM Stasiun KIPM Kendari dapat terus dipertahankan pada kategori sangat baik serta semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan KIPM.

Untuk perbandingan target dan capaian realisasi setiap triwulan serta Renstra 2024-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 10 Target dan Realisasi Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari

Realisasi Tahun 2024		Tahun 2025							Renstra 2024-2029		
TW II	2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2025	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	Target 2025	% Capaian thd Target
93,28	84	86,69	88	93,77	106,56	7,06	88	93,77	84	93,77	106,56

2.3 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Stasiun KIPM Kendari pada tahun anggaran (TA) 2025 adalah Rp **8,203,239,000,-**. Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Kendari pada Triwulan II Tahun 2025 mencapai Rp **1,675,207,602,-** atau sebesar **20,42%**. Rekapitulasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Kendari T.A 2025 berdasarkan jenis belanja dan jenis kegiatan disajikan pada Tabel 2.11 dan Tabel 2.12

Tabel 2. 11 Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja pada Triwulan II Tahun 2025

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
---------------	-----------	----------------	---

Belanja Pegawai	4,483,494,000	1,068,599,001	23.83
Belanja Barang	3,719,745,000	606,608,601	16.31
Belanja Modal	0	0	0
TOTAL	8,203,239,000	1,675,207,602	20.42

Tabel 2. 12 Penyerapan Anggaran per Jenis Kegiatan pada Triwulan II Tahun 2025

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pengendalian Mutu	305,000,000	8,440,000	2,77
Manajemen Mutu	149,000,000	23,092,000	15,50
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	7,749,239,000	1,643,675,602	21.21
TOTAL	8,203,239,000	1,675,207,602	39,48

BAB III PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja Triwulan II tahun 2025, SKIPM Kendari telah melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada program untuk mencapai sasaran, sesuai dengan pengukuran kinerja terlihat bahwa target-target dari sasaran yang ingin dicapai pada Triwulan II, secara umum tercapai.

Nilai capaian kinerja IKU dan IK Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kendari pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 110,51%.

Dari 14 indikator kinerja (14 IKU dan 3 Sasaran Kegiatan), pada Triwulan II Tahun 2025 terdapat 9 indikator kinerja (112,03%) (Istimewa) yang pencapaiannya memenuhi atau melebihi target dan masih terdapat 1 IKU yang belum tercapai yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari dengan rekomendasi Untuk lebih meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari pada periode semester II.

Demikian Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 disusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja di lingkup SKIPM Kendari dan data dukung pengukuran kinerja di BPPMHKP.

LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Kendari Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	70
		3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	75
		5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	71,5
		8.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	100
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Indeks)	87
		10.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	86
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	85
		12.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	76

		13.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	70
		14.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	88

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7,749,239,000
2.	Manajemen Mutu	149,000,000
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	305,000,000
Total Anggaran Stasiun KIPM Kendari Tahun 2025		8,203,239,000